

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.01.1.692003/2025**

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 - 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 - 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 - 4. Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL
 - Sebesar : Rp. 1.944.441.355.000 (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	1.944.441.355.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 1.944.441.355.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

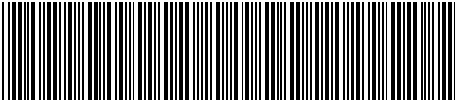
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2025

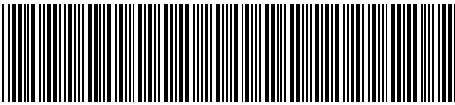


DS:2809-4035-9004-2803

Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	1.944.441.355.000
WA.7092	Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum	Rp.	11.864.109.000
WA.7093	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum	Rp.	48.627.269.000
WA.7094	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum	Rp.	16.299.833.000
WA.7095	Pengelolaan Program, Anggaran, Tatalaksana, Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	Rp.	18.759.408.000
WA.7096	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum	Rp.	14.019.560.000
WA.7097	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum	Rp.	1.834.871.176.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2809-4035-9004-2803

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen			1.944.441.355.000
Kegiatan	:	7092	Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum			11.864.109.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Layanan Advokasi Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permintaan			
		2. 01	Persentase Usulan Peraturan Menteri Hukum yang difasilitasi			
		3. 01	Persentase sentimen positif terhadap total sentimen terkait Publikasi Kementerian Hukum dan HAM			
		4. 02	Indeks kepuasan UKE 1 dan kewilayahan terhadap layanan Administrasi Kerja Sama			
		5. 02	Persentase Layanan Advokasi Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permintaan			
		6. 03	03 Persentase Putusan Perkara yang Dimenangkan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7092.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	17,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.864.109.000
Rincian Output	:	01 EBA.001	Pembinaan dan Pelaksanaan Humas, Hukum, dan Kerja Sama	7,00	Laporan	7.046.439.000
		02 EBA.002	Kerja Sama	2,00	Laporan	3.014.060.000
		03 EBA.957	Layanan Hukum	1,00	Layanan	134.610.000
		04 EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6,00	Layanan	1.648.000.000
		05 EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1,00	Layanan	21.000.000
Kegiatan	:	7093	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum			48.627.269.000
	:	1. 01	Indeks Merit Sistem			
		2. 02	Indeks Profesionalitas ASN			
		3. 03	Indeks Kepuasan Kerja ASN Kemenkumham			
		4. 04	Indeks Kepuasan UKE 1 dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Sumber Daya Manusia			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7093.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	5.001,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	48.627.269.000
Rincian Output	:	01 EBC.001	Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM	1,00	Layanan	25.646.100.000
		02 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	5000,00	Orang	22.981.169.000

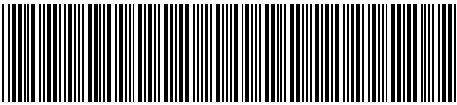
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2025
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

Kegiatan	:	7094	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum			16.299.833.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum			
		2. 02	Indeks kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Keuangan			
		3. 03	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7094.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	20,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	16.299.833.000
Rincian Output	:	01	EBD.001 Layanan Manajemen Keuangan Sekretariat Jenderal	6.00	Dokumen	488.305.000
		02	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	14.00	Dokumen	15.811.528.000
Kegiatan	:	7095	Pengelolaan Program, Anggaran, Tatalaksana, Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum			18.759.408.000
	:	1. 01	Indeks Pelayanan Publik			
		2. 01	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Hukum			
		3. 01	Nilai SAKIP Kementerian Hukum			
		4. 01	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum			
		5. 02	Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Perencanaan			
		6. 02	Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik			
		7. 02	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan SAKIP Kementerian Hukum			
		8. 02	Rata-rata Capaian Kinerja Satuan Kerja Kementerian Hukum (SMART)			
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7095.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	10,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	6.307.735.000
Rincian Output	:	01	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	10.00	Dokumen	6.307.735.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2025
I A. INFORMASI KINERJA

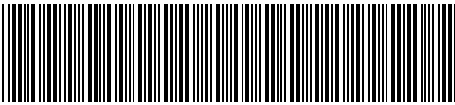


DS:2809-4035-9004-2803

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

Klasifikasi Rincian Output	5	:	7095.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	12.451.673.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian	1.00	Dokumen	184.996.000
		:	02	EBD.002 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Unit Sekretariat Jenderal	1.00	Dokumen	536.580.000
		:	03	EBD.003 Penyusunan Informasi Kinerja dan Supervisi Anggaran	2.00	Dokumen	4.296.081.000
		:	04	EBD.004 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum	3.00	Dokumen	4.248.121.000
		:	05	EBD.005 Layanan Manajemen Kinerja Kementerian	1.00	Dokumen	180.750.000
		:	06	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	396.348.000
		:	07	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	3.00	Dokumen	2.432.547.000
		:	08	EBD.975 Layanan Manajemen Kinerja Sekretariat Jenderal	1.00	Dokumen	176.250.000
Kegiatan		:	7096	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum			14.019.560.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan kewilayahan terhadap layanan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa			
		:	2. 02	Nilai Kualitas Pengelolaan Asset			
		:	3. 03	Nilai Tata Kelola Pengadaan			
		:	4. 04	Persentase Pengendalian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)			
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7096.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	14.019.560.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	15.00	Laporan	14.019.560.000
Kegiatan		:	7097	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum			1.834.871.176.000
		:	1. 01	Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip			
		:	2. 01	Persentase Layanan Tata Usaha Pimpinan yang Diselesaikan			
		:	3. 02	Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal terhadap Layanan Rumah Tangga			
		:	4. 03	Persentase Layanan Tata Usaha yang Diselesaikan			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2809-4035-9004-2803

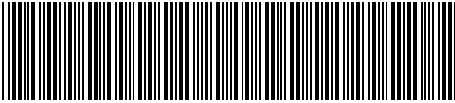
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum						
	5.	04	Indeks Kepuasan Layanan Pengamanan Lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			
	6.	05	Persentase Layanan protokol yang Diselesaikan			
	7.	06	Indeks Kepuasan Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal terhadap Layanan Internal di Lingkungan Sekretariat Jenderal			
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7097.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 1.819.518.686.000
Rincian Output	:	01	EBA.001	Layanan BMN Unit Eselon I Setjen	1.00	Layanan 133.420.000
		02	EBA.959	Layanan Protokoler	2.00	Laporan 3.078.732.000
		03	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Laporan 15.956.835.000
		04	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan 1.800.349.699.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	7097.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	42,00	Unit, m2, Paket 14.641.475.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	40.00	Unit 12.357.940.000
		02	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit 2.283.535.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	7097.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi 711.015.000
Rincian Output	:	01	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Laporan 711.015.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2025
I B. SUMBER DANA



DS:2809-4035-9004-2803

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

				Pagu		Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.944.441.355.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.944.441.355.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DS:2809-4035-9004-2803

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL
Kewenangan : (KP)

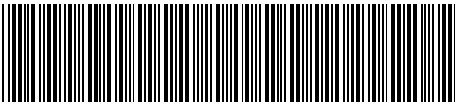
KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692003	SEKRETARIAT JENDERAL	1.490.164.878	439.635.002	14.641.475	-	-	1.944.441.355	01 . 51	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.490.164.878	439.635.002	14.641.475	-	-	1.944.441.355		
7092	Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum	-	11.864.109	-	-	-	11.864.109		
7092.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	11.864.109	-	-	-	11.864.109		
01 RM		-	11.864.109	-	-	-	11.864.109		
7093	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum	-	48.627.269	-	-	-	48.627.269		
7093.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	48.627.269	-	-	-	48.627.269		
01 RM		-	48.627.269	-	-	-	48.627.269		
7094	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum	-	16.299.833	-	-	-	16.299.833		
7094.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	16.299.833	-	-	-	16.299.833		
01 RM		-	16.299.833	-	-	-	16.299.833		

DS:2809-4035-9004-2803

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL
Kewenangan : (KP)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2809-4035-9004-2803

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL
Kewenangan : (KP)

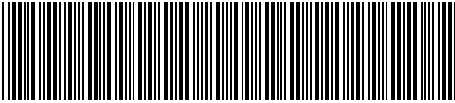
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7097.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	1.490.164.878	329.353.808	-	-	-	1.819.518.686	01 . 51	
01 RM		1.490.164.878	329.353.808	-	-	-	1.819.518.686	139@	
7097.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	14.641.475	-	-	14.641.475	01 . 51	
01 RM		-	-	14.641.475	-	-	14.641.475	139	
7097.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	711.015	-	-	-	711.015	01 . 51	
01 RM		-	711.015	-	-	-	711.015	139@	
JUMLAH		1.490.164.878	439.635.002	14.641.475	-	-	1.944.441.355		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



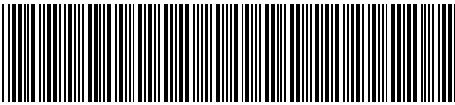
DS:2809-4035-9004-2803

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692003	SEKRETARIAT JENDERAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	164.561.884	162.760.642	163.960.334	161.250.012	160.907.266	161.157.087	164.112.530	161.301.571	164.392.241	162.985.679	160.163.254	156.888.856	1.944.441.355
		BELANJA PEGAWAI	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.610	1.490.164.878
		BELANJA BARANG	31.023.556	38.580.254	39.779.946	37.069.624	36.710.003	36.818.824	39.915.267	36.123.308	36.669.478	38.788.416	35.636.956	32.519.371	439.635.002
		BELANJA MODAL	9.357.940	0	0	0	16.875	157.875	16.875	997.875	3.542.375	16.875	345.910	188.875	14.641.475
		135.01.WA.7092 Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum	0	1.212.592	976.442	1.081.065	1.070.788	1.089.030	1.632.452	1.413.691	882.298	1.233.109	642.161	630.481	11.864.109
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	1.212.592	976.442	1.081.065	1.070.788	1.089.030	1.632.452	1.413.691	882.298	1.233.109	642.161	630.481	11.864.109
		135.01.WA.7093 Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum	2.882.769	4.009.051	6.462.607	4.356.983	3.021.577	3.811.666	3.612.318	3.667.347	3.776.572	6.908.913	2.887.264	3.230.204	48.627.269
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.882.769	4.009.051	6.462.607	4.356.983	3.021.577	3.811.666	3.612.318	3.667.347	3.776.572	6.908.913	2.887.264	3.230.204	48.627.269
		135.01.WA.7094 Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum	204.520	4.646.547	1.742.559	749.375	642.754	920.942	2.886.756	1.247.561	822.641	705.820	1.242.073	488.285	16.299.833
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	204.520	4.646.547	1.742.559	749.375	642.754	920.942	2.886.756	1.247.561	822.641	705.820	1.242.073	488.285	16.299.833
		135.01.WA.7095 Pengelolaan Program, Anggaran, Tatalaksana, Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	81.439	656.722	1.788.272	2.107.056	3.410.257	2.262.270	1.953.385	1.406.053	954.577	1.354.742	2.605.471	179.163	18.759.408
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	81.439	656.722	1.788.272	2.107.056	3.410.257	2.262.270	1.953.385	1.406.053	954.577	1.354.742	2.605.471	179.163	18.759.408
		135.01.WA.7096 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa	518.674	677.321	1.432.045	1.397.125	1.186.607	1.356.896	2.452.336	1.010.635	1.331.369	1.207.811	881.967	566.775	14.019.560

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2809-4035-9004-2803

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692003) SEKRETARIAT JENDERAL

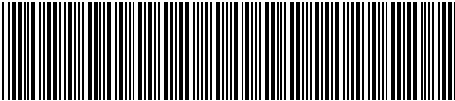
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
135.01.WA.7097		Kementerian Hukum													
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	518.674	677.321	1.432.045	1.397.125	1.186.607	1.356.896	2.452.336	1.010.635	1.331.369	1.207.811	881.967	566.775	14.019.560
		Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum	160.874.482	151.558.409	151.558.409	151.558.409	151.575.284	151.716.284	151.575.284	152.556.284	156.624.784	151.575.284	151.904.319	151.793.947	1.834.871.176
		51 BELANJA PEGAWAI	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.388	124.180.610	1.490.164.878
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	27.336.154	27.378.021	27.378.021	27.378.021	27.378.021	27.378.021	27.378.021	27.378.021	28.902.021	27.378.021	27.378.021	27.424.462	330.064.823
		53 BELANJA MODAL	9.357.940	0	0	0	16.875	157.875	16.875	997.875	3.542.375	16.875	345.910	188.875	14.641.475
		PERKIRAAN PENERIMAAN	644.174	644.174	644.174	644.174	644.174	644.174	644.174	644.174	644.174	644.174	644.174	644.166	7.730.080
		- PNPB (425131)	644.174	644.174	644.174	644.174	644.174	644.174	644.174	644.174	644.174	644.174	644.174	644.166	7.730.080

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2025
IV A. B L O K I R



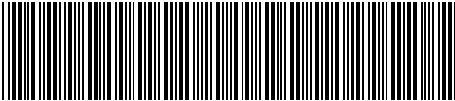
DS:2809-4035-9004-2803

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692003] SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692003	SEKRETARIAT JENDERAL	7093.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 67.872.481	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	52 Belanja Barang Rp. 67.872.481		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.067.034
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
7092	Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7092.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 83.965
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.764.046		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.031.150
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 173.060		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 109.758
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 298.607		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7094	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	7094.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 256.282		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.721.976
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.120.380	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 153.680
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
7093	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.119.797

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2025
IV A. B L O K I R



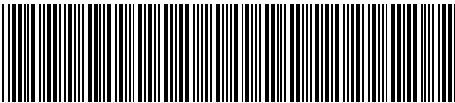
DS:2809-4035-9004-2803

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692003] SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7095 7095.EBA	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7096 7096.EBA	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.200 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.177.604 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.758.750 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Pengelolaan Program, Anggaran, Tatalaksana, Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 187.460 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 819.877 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.160 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.448.138 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.042.386 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.385 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 201.377 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 382.026 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.890.678 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.163.227 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2025
IV A. B L O K I R



DS:2809-4035-9004-2803

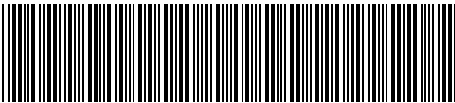
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692003] SEKRETARIAT JENDERAL

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7097 7097.EBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum		
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.924.936		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 368.700		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 121.787		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7097.EBD	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.223.720		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 156.435		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.900		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.1.692003/2025
IV B. C A T A T A N



DS:2809-4035-9004-2803

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692003] SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692003	SEKRETARIAT JENDERAL		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
7097	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum		
7097.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 14.641.475		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* KBLBB es II sebanyak 6 Unit dan KBLBB operasional sebanyak 16 unit Rp. 12.357.940		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Renovasi ruang UKPBJ seluas 250 M2 Rp. 2.283.535		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA